



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 955/ 219 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 955/1
TAHUN 2019 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PADA PEMERINTAH
KABUPATEN PURBALINGGA SEBAGAI BENDAHARA UMUM DAERAH DAN
KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya pelantikan pejabat struktural di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga, maka untuk tertib administrasi serta kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 perlu mengubah Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 955/1 Tahun 2019 tentang Penunjukan Pejabat Pada Pemerintah Kabupaten Purbalingga Sebagai Bendahara Umum Daerah Dan Kuasa Bendahara Umum Daerah Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 955/1 Tahun 2019 tentang Penunjukan Pejabat Pada Pemerintah Kabupaten Purbalingga Sebagai Bendahara Umum Daerah Dan Kuasa Bendahara Umum Daerah Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4955);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6/12

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 30);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 93 Tahun 2018 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 93);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 955/1 Tahun 2019 tentang Penunjukan Pejabat Pada Pemerintah Kabupaten Purbalingga Sebagai Bendahara Umum Daerah Dan Kuasa Bendahara Umum Daerah Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dengan Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Perubahan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah adanya Pejabat pada Pemerintah Kabupaten Purbalingga sebagai Bendahara Umum Daerah Dan Kuasa Bendahara Umum Daerah Tahun Anggaran 2019 yang diganti sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

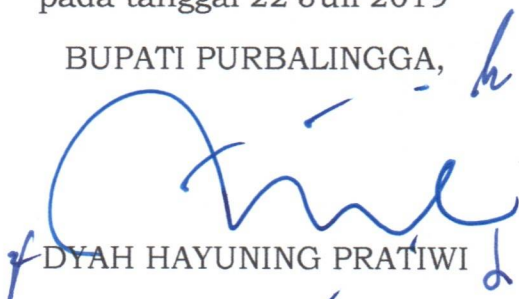
6 Feb

KETIGA : Specimen tanda tangan dan paraf pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 22 Juli 2019

BUPATI PURBALINGGA,



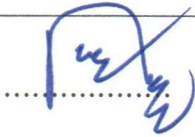

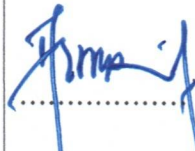



DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Gubernur Jawa Tengah Cq. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
2. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
3. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
5. Pimpinan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Purbalingga;
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR TAHUN 2019
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI
 PURBALINGGA NOMOR 955/1 TAHUN 2019
 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PADA
 PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
 SEBAGAI BENDAHARA UMUM DAERAH DAN
 KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH TAHUN
 ANGGARAN 2019

PEJABAT YANG DITUNJUK SEBAGAI BENDAHARA UMUM DAERAH
 DAN KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

NO.	NAMA / NIP	JABATAN	SPECIMEN TANDA TANGAN	PARAF
1.	Drs. SUBENO, S.E., M.Si. NIP. 19610812 198603 019	Kepala BAKUDA Kabupaten Purbalingga		
2.	HENI RUSIANTI, S.E. NIP. 19690420 199303 2 003	Kabid Perbendaharaan pada BAKUDA Kabupaten Purbalingga		
3.	TRIAN APTININGSIH, S.Sos., M.M. NIP. 19730410 199402 2 004	Kasubid Perbendaharaan pada BAKUDA Kabupaten Purbalingga		

BUPATI PURBALINGGA, 


 DYAH HAYUNING PRATIWI 